

TARGET KINERJA OMBUDSMAN TAHUN 2025

Senin, 20 Januari 2025 - kalbar

Pontianak, Sonora.ID - Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat, Tariyah menegaskan pihaknya memiliki target kinerja yang akan dicapai di tahun 2025 ini.

Tariyah mengatakan yang menjadi target di tahun 2025 itu berangkat dari target kinerja pada tahun 2024 kemarin. Hal itu disampaikan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar, Jumat (17/1/2025).

"Tentu pertama kami berangkat dari target kinerja yang diberikan oleh Ombudsman Pusat di Jakarta. Target kinerja yang pertama adalah penanganan laporan, target kinerja penanganan laporan tahun 2025 yaitu sebanyak 243 laporan dan itu harus laporan yang sudah diselesaikan di tahap pemeriksaan, "ujarnya.

Yang kedua, lanjutnya adalah target kinerja dalam bentuk Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, selebihnya adalah dalam bentuk pengawasan, penilaian kepatuhan di lima belas pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.

Seperti diketahui bahwa Ombudsman Perwakilan Kalbar sepanjang tahun 2024 kemarin mencatat telah menyelesaikan 406 laporan masyarakat.

Sementara itu Tariyah menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pelayanan publik, baik bersifat internal dan eksternal. "Tantangan internal yang pertama, bahwa penyelenggara pelayanan publik, siapapun penyelenggaranya wajib memenuhi dua pondasi pelayanan publik, pertama yaitu memenuhi standar pelayanan publik, "ungkapnya. Tantangan lain lanjutnya, adalah tantangan dalam menjaga integritas. Kemudian tantangan eksternal yaitu bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan pelayanan yang diberikan. Kedua, bagaimana masyarakat memiliki edukasi dan kesadaran dalam mengakses pelayanan publik. "Baik secara mandiri dengan datang langsung, maupun secara online, "tampalnya.

Selama ini pemerintah dengan Ombudsman seyogyanya menjadi mitra yang selalu bersinergi dan berkolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena Ombudsman sendiri berada di ruang pengawasan eksternal. Sementara pemerintah, OPD, lembaga negara, dan lembaga pemerintah lainnya adalah sebagai penyelenggara pelayanan publik.

"Saya menghadiri undangan BPS untuk memastikan bahwa standar pelayanan yang dilakukan BPS itu sesuai, sebagaimana mestinya dan realistis untuk dilaksanakan, dan pasti bisa diakses oleh masyarakat, "tutupnya.